Nusantara Hasana Journal
Volume 5 No. 2 (Juli 2025), Page: 383-389
E-ISSN : 2798-1428

KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD) PEREMPUAN DI KABUPATEN SUMBAWA PERIODE 2019-2024

Performance of The People's Representative Council (DPRD) for Women in Sumbawa Regency for The 2019-2024 Period

Leni Nurul Kariyani

Universitas Teknologi Sumbawa

Email: leni.nurul.kariyani@uts.ac.id

Abstract
This study aims to analyze the performance of female members of the Regional House of Representatives (DPRD) in Sumbawa Regency during the 2019–2024 period through three main indicators: accountability, responsiveness, and effectiveness, as well as to identify the internal and external factors that influence their performance. This research employs a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. Accountability is reflected through transparent activity reporting and public openness. Responsiveness is demonstrated by their attention to public aspirations, particularly from vulnerable groups such as women, WRSE, and low-income communities. The effectiveness of legislative and oversight duties is relatively good, although they still face structural barriers and patriarchal cultural norms. Internal factors that influence their performance include motivation, capability, personality, and health conditions. Meanwhile, external factors encompass organizational culture, compensation systems, the use of technology, and support for training and development. The presence of women in the DPRD has made a real contribution to local political processes, although strengthening their substantive representation remains necessary to ensure their roles are not merely symbolic.
Keywords: *DPRD Performance, Women, Accountability, Responsiveness, Effectiveness, Internal Factors, External Factors*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggota DPRD perempuan Kabupaten Sumbawa periode 2019–2024 melalui tiga indikator utama yaitu akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Akuntabilitas tercermin dalam keterbukaan pelaporan kegiatan dan transparansi terhadap publik. Responsivitas terlihat dari kepedulian terhadap aspirasi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, WRSE, dan masyarakat miskin. Efektivitas pelaksanaan tugas legislatif dan pengawasan cukup baik, meskipun masih menghadapi kendala struktural dan budaya patriarkal. Faktor internal yang memengaruhi meliputi motivasi, kemampuan, kepribadian, dan kondisi kesehatan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup budaya organisasi, sistem kompensasi, pemanfaatan teknologi, serta dukungan pelatihan dan pengembangan. Keberadaan perempuan di DPRD telah memberikan kontribusi nyata dalam proses politik lokal, namun masih diperlukan penguatan pada aspek representasi substantif agar peran mereka tidak sebatas simbolik.
Kata Kunci: Kinerja DPRD, Perempuan, Akuntabilitas, Responsivitas, Efektivitas, Faktor Internal, Faktor Eksternal

Nusantara Hasana Journal
Volume 5 No. 2 (Juli 2025), Page: 383-389
E-ISSN : 2798-1428

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang bertugas menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat daerah. Sebagai lembaga perwakilan, DPRD memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi rakyat melalui pembuatan peraturan daerah, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta pengalokasian anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Local Government in Indonesia oleh Eko Prasojo (2017), DPRD adalah "mitra pemerintah daerah yang bertugas memastikan pembangunan berorientasi pada kepentingan publik."

Keberadaan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa DPRD adalah mitra sejajar dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. DPRD bertugas memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel (Zulkarnaen, 2020, Jurnal Pemerintahan).Dalam rangka menciptakan perwakilan yang inklusif, sistem politik di Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan perempuan dalam DPRD. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan kelima, yang menekankan pentingnya kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk politik (Bappenas, 2022).

Kehadiran perempuan di DPRD diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam pengambilan kebijakan, terutama pada isu-isu yang berdampak langsung pada kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin. Namun, partisipasi perempuan di DPRD masih menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun daerah (Gender and Politics in Indonesia, Blackburn et al., 2018).Keterwakilan perempuan di legislatif diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang menetapkan kuota 30% bagi calon perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan afirmasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan mempersempit kesenjangan gender di lembaga perwakilan (Jurnal Politik dan Gender, Siregar, 2021).

Meskipun telah ada kebijakan afirmasi, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal. Banyak perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD menghadapi tantangan struktural, seperti budaya patriarki, keterbatasan sumber daya, serta minimnya dukungan politik dari partai (Blackburn & Bessell, 2021).Perempuan yang berhasil duduk di DPRD juga harus membuktikan kapasitas dan kualitasnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini sering kali menjadi tantangan, terutama di daerah yang memiliki budaya politik tradisional yang masih cenderung diskriminatif terhadap perempuan (Jurnal Kebijakan Publik Daerah, 2022).

Perempuan anggota DPRD memiliki potensi besar untuk membawa perubahan signifikan dalam pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender (Perempuan dan Politik di Indonesia, Rosalind et al., 2020).Kabupaten Sumbawa, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu daerah dengan karakteristik sosial budaya yang kuat. Sebagai daerah dengan sistem adat yang kental, partisipasi perempuan dalam politik sering kali dihadapkan pada tantangan budaya yang membatasi peran mereka (Susilowati, 2019, Jurnal Studi Gender). Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008

Nusantara Hasana Journal
Volume 5 No. 2 (Juli 2025), Page: 383-389
E-ISSN : 2798-1428

tentang Partai Politik memberikan kuota 30% untuk keterlibatan perempuan dalam politik. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen dan mendorong partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan politik. Namun, meskipun ada kebijakan ini, kenyataannya, keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat jauh dari angka yang diharapkan. Berdasarkan Wery Gusmansyah (2023), meskipun kuota 30% diatur secara formal, secara statistik angka tersebut masih dinilai tidak adil dan belum mencapai tujuan yang diinginkan.

Kendala utama dalam implementasi kuota perempuan ini adalah kurangnya dukungan dari partai politik, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, dan pengalaman politik yang terbatas. Hal ini menyebabkan banyak perempuan anggota DPRD atau legislatif lainnya harus berjuang sendiri untuk meningkatkan kapasitas dan membangun jaringan politik. Selain itu, meskipun jumlah perempuan dalam DPRD meningkat, efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran masih menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, untuk mencapai keterwakilan yang adil dan efektif, perlu ada evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan kuota perempuan, serta peningkatan dukungan dan pembinaan dari partai politik agar perempuan dapat berperan maksimal dalam pengambilan kebijakan dan proses legislatif.

Peningkatan kinerja perempuan di DPRD Kabupaten Sumbawa menjadi sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif gender. Dengan kapasitas yang lebih baik, perempuan anggota DPRD dapat memainkan peran strategis dalam mendorong kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan (SDGs Gender Report Indonesia, Bappenas, 2022)Selain itu, peningkatan keterlibatan perempuan di DPRD juga merupakan langkah penting untuk mendukung agenda nasional dalam memperkuat pemberdayaan perempuan di bidang politik (Jurnal Politik dan Pembangunan Daerah, 2021).

Minimnya kajian spesifik tentang kinerja DPRD perempuan di Kabupaten Sumbawa menjadi celah yang perlu diisi. Penelitian yang ada umumnya hanya berfokus pada aspek kuantitatif keterwakilan perempuan tanpa mengeksplorasi kualitas kontribusi mereka dalam pengambilan kebijakan (Zulkarnaen, 2020).Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perempuan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2019-2024 berdasarkan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Analisis ini dibatasi pada anggota perempuan DPRD di lingkup lokal, dengan fokus pada peran mereka dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan responsif gender.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada pengukuran atau statistik, tetapi lebih kepada pemahaman tentang pengalaman,perspektif, dan interpretasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang menjadi objek penelitian.Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap makna dan konteks dari masalah yang diteliti, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhinya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan,pada objek yang diteliti dengan menggunakan tiga teknik yaitu

Nusantara Hasana Journal
Volume 5 No. 2 (Juli 2025), Page: 383-389
E-ISSN : 2798-1428

observasi,wawancara dan dokumentasi, kepada anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan (deskriptif) dan menganalisis fenomena atau aktivitas sosial, baik yang melibatkan individu maupun kelompok, khususnya dalam konteks peran perempuan di lembaga legislatif daerah.Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui "Kinerja DPRD Perempuan di Kabupaten Sumbawa Periode 2019-2024", yang dalam hal ini akan menilai bagaimana kinerja anggota DPRD perempuan dalam merespons kepentingan perempuan di daerah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perempuan yang terpilih dalam DPRD dapat mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas legislatif mereka di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD perempuan Kabupaten Sumbawa periode 2019–2024 dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya.Pertama, dari segi akuntabilitas, para legislator perempuan menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip transparansi dan tanggung jawab publik. Mereka secara aktif menyampaikan laporan kegiatan melalui forum resmi, seperti masa reses, pertemuan masyarakat, hingga media sosial. Misalnya, Ida Rahayu dari Partai Amanat Nasional menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan, reses, dan usulan program pembangunan disampaikan melalui musyawarah kelurahan atau desa dalam bentuk laporan terbuka. Sri Wahyuni dari Demokrat menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar menyusun laporan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami dan merasakan manfaat dari program yang diperjuangkan.

Meski demikian, pelaksanaan akuntabilitas masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan media pelaporan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta minimnya publikasi digital yang menyeluruh.Selanjutnya, aspek responsivitas anggota DPRD perempuan juga terlihat sangat menonjol. Mereka menunjukkan kepekaan tinggi terhadap aspirasi masyarakat, khususnya dalam isu perempuan, anak, pendidikan, dan layanan kesehatan dasar. Responsivitas ini tercermin dalam berbagai tindakan nyata, seperti penyaluran bantuan langsung berupa beasiswa, sembako, dan pembangunan infrastruktur dasar yang dilaksanakan saat masa reses. Sebagai contoh, Ida Rahayu memperjuangkan pengadaan sumur bor dan pembangunan talud di daerah pemilihannya. Sri Wahyuni dari PKB menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat dicatat dan diusulkan dalam pembahasan sidang komisi. Namun, responsivitas ini kerap terkendala faktor eksternal, terutama ketika aspirasi masyarakat tidak menjadi prioritas pemerintah daerah atau terbentur kebijakan penganggaran APBD, sehingga beberapa usulan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.Berikutnya, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD perempuan dinilai cukup baik. Mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan komisi, sidang paripurna, dan pengawasan proyek pemerintah daerah. Contohnya, Hj. Jamila dan Dra. Saidatul Kamila Djibril dari PDI-P terlibat dalam distribusi bantuan sosial serta penguatan peraturan daerah terkait pendidikan dan kesehatan. Yuliana dari NasDem juga menekankan

Nusantara Hasana Journal
Volume 5 No. 2 (Juli 2025), Page: 383-389
E-ISSN : 2798-1428

pentingnya pengawasan inklusif agar seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh hak dan akses yang setara. Meski demikian, efektivitas ini masih terbatas oleh minimnya keterlibatan perempuan pada posisi strategis di internal DPRD, seperti ketua komisi atau pimpinan fraksi, serta dominasi aktor laki-laki dalam pengambilan keputusan.

Faktor internal yang memengaruhi kinerja legislator perempuan meliputi kemampuan, motivasi, sikap, kepribadian, dan kesehatan. Hampir seluruh informan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi yang memadai. Sebagai contoh, Ida Rahayu telah menjabat selama empat periode dan memiliki pemahaman mendalam tentang proses legislasi dan penganggaran. Motivasi tinggi dalam melayani masyarakat menjadi kekuatan tersendiri, bahkan beberapa anggota rela menggunakan dana pribadi untuk membantu masyarakat di luar mekanisme formal. Sikap terbuka, kedisiplinan, dan kepedulian sosial menjadi karakter dominan yang muncul dari hasil wawancara. Kesehatan fisik dan mental juga menjadi faktor penting, mengingat tugas kedewanan memerlukan mobilitas tinggi dan stamina kuat.Sementara itu, faktor eksternal seperti budaya organisasi, kompensasi, pemanfaatan teknologi, dan pelatihan turut memengaruhi kinerja mereka. Budaya kerja di DPRD Kabupaten Sumbawa cenderung kekeluargaan, memberikan ruang kerja yang lebih suportif bagi perempuan. Namun, hambatan struktural seperti stereotip peran gender masih membatasi akses perempuan pada ruang strategis.

Dari sisi kompensasi, anggota DPRD perempuan mengakui bahwa gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima sudah memadai untuk mendukung kinerja. Akan tetapi, fasilitas khusus seperti penitipan anak dan ruang laktasi yang ramah perempuan belum tersedia. Dalam hal teknologi, pemanfaatan WhatsApp grup, media sosial, dan sistem e-budgeting membantu kelancaran komunikasi dan penyampaian aspirasi. Sayangnya, pelatihan penggunaan teknologi dan peningkatan kapasitas kepemimpinan khusus bagi perempuan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis yang inklusif menjadi hal penting yang perlu diperhatikan untuk memperkuat peran politik perempuan di legislatif daerah.

Beberapa faktor Yang menjadi pengukur kinerja dewan legislatif rakyat daerah (DPRD) perempuan kabupaten sumbawa diantaranya ialah sebagai berikut.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam kinerja anggota DPRD, termasuk bagi anggota perempuan di Kabupaten Sumbawa periode 2019–2024. Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota, diketahui bahwa pelaporan kegiatan secara tertulis dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran. Meskipun terdapat mekanisme pelaporan, pelaksanaannya belum sepenuhnya seragam. Ada variasi dalam cara dan frekuensi pelaporan oleh masing-masing anggota. Sebagian aktif menginformasikan kinerja melalui forum publik atau media sosial, sementara lainnya lebih terbatas pada pelaporan administratif internal. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas formal belum sepenuhnya disertai dengan keterbukaan informasi yang konsisten kepada publik, sehingga partisipasi dalam pengawasan belum dapat berjalan secara optimal.

Responsivitas

Responsivitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja anggota

Nusantara Hasana Journal
Volume 5 No. 2 (Juli 2025), Page: 383-389
E-ISSN : 2798-1428

DPRD, khususnya dalam hal kepekaan dan tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah anggota DPRD perempuan Kabupaten Sumbawa, responsivitas tampak dari keterlibatan mereka dalam kegiatan reses, kunjungan lapangan, dan komunikasi informal yang digunakan untuk menjaring aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat,Selain kegiatan formal, terdapat pula inisiatif membantu warga dalam situasi darurat, seperti bantuan terhadap penderita kanker mata. Meskipun tindakan ini menunjukkan kepedulian sosial, namun bersifat individual dan belum menjadi bagian dari kebijakan sistematis DPRD. Selain itu kegiatan keagamaan seperti majelis taklim menjadi sarana menjalin komunikasi yang lebih nyaman antara anggota dewan dan konstituen perempuan.

Efektivitas

Efektivitas menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan kinerja anggota DPRD, khususnya dalam hal pencapaian tujuan, pelaksanaan program, serta kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD perempuan Kabupaten Sumbawa, efektivitas kinerja mereka terlihat dari kemampuan mengelola tugas legislatif, pengawasan, serta hubungan dengan masyarakat secara sinergis dan terukur.

Ibu Ida Rahayu, anggota DPRD dari Fraksi PAN, menegaskan bahwa efektivitas dapat dilihat dari bagaimana anggota dewan mampu menjalankan fungsinya dalam pembuatan kebijakan yang tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa selama ini, koordinasi antara komisi, fraksi, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan program yang diusulkan berjalan sesuai harapan masyarakat. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas tidak hanya berhubungan dengan hasil akhir, tetapi juga melibatkan proses koordinasi dan pengambilan keputusan yang partisipatif. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, efektivitas kinerja anggota DPRD perempuan Kabupaten Sumbawa periode 2019–2024 tampak dari keterlibatan mereka dalam pelaksanaan tugas legislatif, pengawasan, dan representasi. Masing-masing anggota menunjukkan pendekatan berbeda, seperti pemanfaatan teknologi, partisipasi dalam reses, serta pengawasan terhadap program sosial.Beberapa dari mereka juga berupaya mendorong pemberdayaan perempuan danmenjalin kerja sama lintas sektor untuk mengoptimalkan dampak program. Namun demikian, tidak seluruh upaya tersebut terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk kebijakan yang terukur. Oleh karena itu, efektivitas kinerja anggota DPRD perempuan dapat dipahami dari proses pelaksanaan tugas yang dilakukan serta keterhubungan antara aspirasi masyarakat dan tindak lanjut yang diupayakan melalui mekanisme legislatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja anggota DPRD perempuan Kabupaten Sumbawa periode 2019–2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka telah menunjukkan performa yang cukup baik dalam menjalankan fungsi-fungsi legislatif, pengawasan, dan penganggaran. Dalam hal akuntabilitas, para legislator perempuan cenderung memiliki komitmen tinggi terhadap keterbukaan informasi dan tanggung jawab publik. Mereka menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui forum-forum resmi maupun media sosial pribadi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.Dari sisi responsivitas, anggota DPRD perempuan menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap persoalan-

Nusantara Hasana Journal
Volume 5 No. 2 (Juli 2025), Page: 383-389
E-ISSN : 2798-1428

persoalan yang dihadapi konstituennya, khususnya terkait isu perempuan, anak-anak, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap bantuan sosial. Mereka aktif menyerap aspirasi dan berupaya menyuarakan kebutuhan masyarakat melalui forum-forum kedewanan. Sementara itu, efektivitas pelaksanaan tugas mereka tampak dari keterlibatan aktif dalam rapat-rapat komisi, pengusulan program kerja, serta pengawasan proyek pembangunan. Lebih lanjut, kinerja mereka juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal seperti kemampuan personal, pengalaman, motivasi, dan kondisi kesehatan. Para legislator perempuan umumnya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang memadai, serta dorongan kuat untuk memperjuangkan hak-hak konstituen mereka. Sementara itu, faktor eksternal seperti lingkungan kerja yang suportif, sistem kompensasi, serta akses terhadap teknologi turut memberikan dampak positif, meskipun masih terdapat hambatan seperti minimnya pelatihan khusus serta terbatasnya ruang strategis bagi perempuan dalam struktur DPRD.Secara keseluruhan, representasi politik anggota DPRD perempuan di Kabupaten Sumbawa sudah memenuhi aspek formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Hanna Pitkin. Meski demikian, representasi substantif masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengaruh terhadap kebijakan utama yang masih didominasi aktor politik laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, Fadli. *Kinerja Anggota Legislatif Perempuan dalam Konteks Pemberdayaan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Blackburn, S., Bessell, S., & Rosalind, R. (2018). *Gender and Politics in Indonesia*. New York: Routledge.

Hudon, Geraldine. *Gender and Politics in the Global South*. Cambridge University Press.

Prasojo, E. (2017). *Local Government in Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nuri Suseno. (2013). *Representasi Politik*. Jakarta: Puskapol FISIP UI

Sugiono. (2019). *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Bappenas. (2022). *Laporan SDGs Gender Report Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

KPU Sumbawa. (2019). *Data Pemilu DPRD Kabupaten Sumbawa Periode 2019-2024*.

Humas Protokol dan Dokumentasi DPRD Kabupaten Sumbawa. (2019-2024). *Dokumentasi Kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa*.